

## PENDAPATAN DAERAH DI RAPBD 2024 KOTA PEKALONGAN RP971,13 MILIAR



Sumber Gambar:

[https://pekalongankota.go.id/upload/berita/berita\\_20231004042546.jpeg](https://pekalongankota.go.id/upload/berita/berita_20231004042546.jpeg)

### Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menyebutkan pendapatan daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp971,13 miliar atau turun 3,67 persen dibanding dengan target pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1 miliar.

"Sumber pendapatan daerah tersebut terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan sumber pendapatan daerah yang sah," kata Wali Kota Pekalongan Afzan Arslam Djunaid di Pekalongan, Rabu.

Menurut dia, sumber pendapatan daerah masih bergantung pada pendapatan transfer dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jateng, dengan komposisi pendapatan asli daerah sebesar 24,74 persen, pendapatan transfer 71,33 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 0,22 persen.

Terkait dengan pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer dari Pemerintah pusat, Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah dikirimkan masih menggunakan asumsi pendapatan transfer tahun sebelumnya.

"Pada pembahasan nanti akan dilakukan penyesuaian atas alokasi pendapatan transfer sesuai dengan pagu definitif.

Pada Rancangan APBD 2024, penerimaan pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp249,51 miliar atau turun 0,37 persen dibandingkan dengan target PAD pada Perubahan APBD 2023 Rp250,44 miliar," katanya.

Kemudian, pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp719,37 miliar atau turun 4,78 persen dibandingkan dengan target pada Perubahan APBD Tahun 2023 yang sebesar Rp755,46 miliar.

Dikatakan, pendapatan transfer berasal dari Pemerintah pusat terdiri atas dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang direncanakan sebesar Rp637,31 miliar atau naik 2,09 persen dibandingkan dengan target pada Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp650,93 miliar.

Adapun pendapatan transfer antar daerah yang meliputi pendapatan bagi hasil pajak provinsi dan bantuan keuangan dari provinsi, direncanakan sebesar Rp82,06 miliar atau turun sebesar 21,49 persen dibandingkan dengan target pada Perubahan APBD 2023 Rp104,53 miliar.

"Kami berharap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 dapat diterima, dibahas, dan selanjutnya dapat disetujui serta ditetapkan dalam Peraturan Daerah," katanya.

Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Nur Priyantomo mengatakan sejumlah program dan kebijakan pemkot yang dilaksanakan pada 2024 seperti melaksanakan pembangunan infrastruktur terkait penanggulangan banjir dan rob serta pengelolaan sampah perbaikan drainase dan jalan.

"Selain itu, anggaran cukup besar juga dialihkan pada program pendidikan dan kesehatan. Pada 2024 ini, pemkot juga telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2024," katanya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/509988/pendapatan-daerah-di-rapbd-2024-kota-pekalongan-rp97113-miliar>, "Pendapatan Daerah di RAPBD 2024 Kota Pekalongan Rp971,13 Miliar", tanggal 4 Oktober 2023.
2. <https://pekalongankota.go.id/berita/pendapatan-daerah-rapbd-2024-kota-pekalongan-rp971-miliar.html>, "Pendapatan Daerah RAPBD 2024 Kota Pekalongan Rp971 Milliar", tanggal 4 Oktober 2023.
3. <https://pekalongankota.go.id/berita/pendapatan-daerah-rapbd-2024-kota-pekalongan-rp971-miliar.html>, "Tahun 2024, Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Ditargetkan Rp 971 Milliar", tanggal 4 Oktober 2023.

**Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.forummediaonline.com/2022/10/06/proses-penyusunan-apbd-dan-perubahan-apbd/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*